



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Rika Pertiwi<sup>1</sup>, Sujianto<sup>2</sup>, Dadang Mashur<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [rikapertiwi18@gmail.com](mailto:rikapertiwi18@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [sujianto@lecturer.unri.ac.id](mailto:sujianto@lecturer.unri.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia, [dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id](mailto:dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id)

Corresponding Author: [rikapertiwi18@gmail.com](mailto:rikapertiwi18@gmail.com)

**Abstract:** *This research examines poverty as a measure of development success. Meranti Islands Regency is one of the districts with the highest poverty population compared to other districts in Riau Province. Limited infrastructure is one of the causes of the high poverty rate in the Meranti Islands Regency, which consists of several islands, which causes quite high inflation, low economic growth and regional isolation so that basic needs become expensive. The aim of this research is to analyze the implementation of infrastructure development in the Meranti Islands Regency and identify the impacts that influence the implementation of poverty reduction policies in the Meranti Islands Regency. This research uses qualitative methods using observation data analysis, interview study support techniques and documentation. The theory used in this research is the content of policy, the content of policy which influences the implementation process. The research results found that the poverty level in Meranti Islands Regency based on economic and social factors is relatively high.*

**Keyword:** *Implementation, Infrastructure, Socioeconomic.*

**Abstrak:** Penelitian ini adalah kemiskinan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu kabupaten dengan penduduk miskin tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari beberapa pulau yang menyebabkan inflasi cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan keterisoliran daerah sehingga kebutuhan pokok menjadi mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti dan mengidentifikasi dampak yang mempengaruhi implementasi dalam kebijakan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis data observasi, teknik penunjang studi wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi kebijakan *content of policy* yang

mempengaruhi proses implementasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan pada faktor ekonomi dan sosial tergolong tinggi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Infrastruktur, Sosial Ekonomi.

---

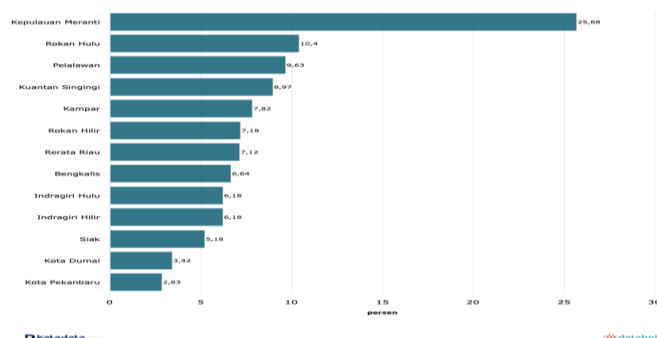
## PENDAHULUAN

Angka kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kurang memadainya infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, sementara ketersediaan infrastruktur memainkan peran penting dalam kegiatan sosial ekonomi (Handalani, 2019). Kemudahan akses infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, jembatan dan fasilitas layanan dasar lainnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap jalan raya, kesempatannya untuk memasuki pasar akan lebih luas dan peluangnya untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak akan semakin besar. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada Negara atau daerah tersebut (Leasiwal, 2013).

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan. Program Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Selama empat tahun terakhir sejak 2019 dalam kondisi sebelum pandemi, jika dicermati lebih jauh, jumlah penduduk miskin secara nominal tidak jauh mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan Maret 2019 dan menurun 0,44 persen terhadap September 2018 belum menggambarkan kesuksesan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Riau masih tergolong cukup tinggi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dari fenomena kemiskinan yang terjadi. Salah satu penyebab peningkatan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau adalah dampak Covid-19 yang menyebabkan timbulnya beberapa fenomena (Azhari & Mashur, 2022). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 angka kemiskinan di Riau secara umum menurun. Tercatat kemiskinan di tahun 2021 adalah 7 persen dan mengalami penurunan menjadi 6,78 persen. Namun, angka kemiskinan ekstrem naik dari 1,12 persen menjadi 1,40 persen. Bahkan untuk angka kemiskinan tertinggi ada di daerah Meranti. Kemiskinan ekstrim turun dari tahun 2021 yang sebelumnya 6,39 persen. Itu artinya kemiskinan ekstrim Meranti turun sekitar 1.560 jiwa.

Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah kawasan gugus kepulauan dengan infrastruktur yang sangat terbatas dan persentase penduduk miskin yang tinggi (Gevisioner et al., 2013). Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dan resmi berdiri 18 Desember 2008. Saat ini penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 217.607 jiwa. Kabupaten Kepulauan Meranti juga menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat penduduk miskinnya paling tinggi dibanding kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 1 Presentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Provinsi Riau (2022)**

Berdasarkan grafik, Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 48,5 ribu jiwa atau 25,68% pada Maret 2021. Artinya 1 dari 4 penduduk di Kepulauan Meranti hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, angka kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat paling rendah, yakni hanya 2,83%. Adanya angka kemiskinan pada setiap daerah pastinya dilatar belakangi oleh penyebab yang hingga dapat terjadi angka kemiskinan yang tinggi. Masih banyak pembangunan yang belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur tidak merata, penyediaan akses jalan yang terbatas, jembatan dan sarana transportasi lainnya untuk membuka isolasi antardesa, antar kecamatan dan antar kabupaten. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Data Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2022**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2020	520,955	47,10	25,28
2021	542,599	48,50	25,68
2022	568,639	45,25	23,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data, terdapat kenaikan jumlah kemiskinan dari tahun sebelumnya dan kembali turun ditahun 2022. Adanya penurunan ini tentu tidak terlepas dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melakukan upaya melalui program- program yang dilaksanakan telah menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,84 persen di tahun 2022. Meski begitu, angka kemiskinan di Meranti masih tergolong tinggi dan harus terus diintervensi melalui berbagai program dari masing-masing satuan kerja pemerintah Kabupaten. Selain itu sulitnya lapangan kerja, masalah pendidikan, kesehatan dan lainnya. Penyebab tingginya angka kemiskinan di Meranti karena akses masih terisolasi. Jika isolasi terbuka dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah infrastruktur dalam suatu daerah, sehingga menghambat mobilitas masyarakat melakukan aktivitas.

Ketersediaan infrastruktur berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan prakondisi penting dalam penanggulangan kemiskinan (Parwodiwiyono, 2021). Sebaliknya, pembangunan infrastruktur yang lambat dapat menjadi halangan bagi pembangunan dan pertumbuhan secara keseluruhan (Amida & Sitorus, 2020). Pelayanan dan kapasitas jalan berkaitan dengan terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang dan jasa, menunjang aktivitas ekonomi dalam pembangunan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Meranti".

## METODE

Penelitian ini menggunakan *mix-method* dengan menggunakan analisis data yang utama adalah observasi (sumber data primer), teknik penunjang studi wawancara dan dokumentasi (sumber data sekunder). Penelitian *mix-method* merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tepatnya di Dinas PUPR ini dikarenakan yang memiliki tugas dan fungsi perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan infrastruktur. Penelitian juga dilakukan di beberapa pulau yang ada di meranti yaitu, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau, dan Pulau Rangsang dengan mengambil sample beberapa informan dari masing-masing pulau dan kecamatan disana. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu jika dilihat dari data, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten termiskin dan termuda diantara kabupaten/kota yang ada di Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembangunan infrastruktur diharapkan mempermudah akses masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain apapun tujuan mobilitas mereka. Wilayah dengan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, perumahan, dan bendungan yang memadai akan membantu masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu wilayah perbatasan di Indonesia terletak jauh dari pusat pembangunan dan kendala geografis yang menyulitkan Pemerintah Pusat untuk memberikan atensi lebih untuk pembangunan di daerah tersebut. Masyarakat lokal masih memiliki tingkat perekonomian rendah karena meletakkan pusat ekonomi pada perkebunan dan perikanan yang tidak dapat menaikkan kontribusi kesejahteraan sosial secara signifikan. Terlebih infrastruktur yang minim dan jalanan rusak membuat terhambatnya aktivitas perdagangan. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat lokal tidak memiliki taraf hidup yang layak pula. Pendidikan yang rendah juga menimbulkan buruknya pengetahuan akan sanitasi, makanan bernutrisi, dan serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan-perusahaan *powerhouse* setempat. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data hasil penelitian melalui proses observasi, wawancara, dan studi pustaka.

#### 1. Isi Kebijakan

Kebijakan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah program sebagai landasan hukum yang memayunginya supaya tidak ada problematika ganggu-gugat dari aktor lain yang memiliki kepentingan bersebrangan. Istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, ataupun suatu lembaga pemerintahan atau jumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu). Sementara itu publik diartikan sebagai masyarakat yang memiliki arti sekumpulan manusia yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Sehingga, kebijakan *public* itu ada untuk mengatur hajat hidup banyak orang oleh karena itu pembuatan substansi kebijakan harus berimbang dan adil.

Peneliti menilai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi urgensi tinggi mengetahui bahwa wilayah ini merupakan pemekaran baru tahun 2008 dan terletak jauh dari pusat pembangunan sehingga ditemui banyak keterbatasan dalam rangka membangun infrastruktur di dalamnya. Sejalan dengan pembangunan yang

minim, letak geografis juga menjadi alasan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut tinggi. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis kebijakan publik yang dijadikan landasan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memuat beberapa isu strategis pembangunan daerah, salah satunya tentang pemerataan infrastruktur vital. Secara umum RPJMD Kep. Meranti 2021-2026 berisikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yakni “Menjadikan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Maju, Cerdas dan Bermartabat”. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut terdapat Target Sasaran melalui 7 Program strategis sebagai berikut:

- 1) Membangun infrastruktur dasar Kabupaten Kepulauan Meranti (membangun jalan yang menghubungkan jalan seluruh Desa dengan Kecamatan, dan Kecamatan dengan Kota/Kabupaten).
- 2) Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Meranti melalui:
  - a) Program 5000 Beasiswa jenjang S1 sampai S3 dari 50 orang putra-putri terbaik setiap desa dan kelurahan 4300 Sarjana (S1); 500 Magister (S2); dan 200 Doktor (S3).
  - b) Mengangkat guru komite dan TU sekolah menjadi honorer kabupaten.
  - c) Memberikan honor kepada guru-guru agama
  - d) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru pendidik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- 3) Menjadikan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rumah sakit rujukan (orang meranti cukup berobat di meranti dengan konsep ketuk pintu layani dengan hati).
- 4) Menciptakan 9500 usahawan, 2500 peternak sapi, kambing, ayam pedaging, ayam petelur serta 500 petani dan 500 nelayan dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mewujudkan ketesedian lapangan kerja.
- 5) Menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas melalui pembangunan dan pengelolaan PDAM.
- 6) Pelayanan Administrasi Prima Yang Mudah, Cepat, Tepat dan Akurat dengan konsep 1 hari siap. 15.000 KK Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam kasus pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 30 yang menyebutkan dengan jelas bahwa pembangunan ditujukan untuk memberikan akses dasar kepada masyarakat miskin ke perusahaan, tempat kerja, wilayah pemerintahan, sekolah dan pasar. Hal ini supaya mempermudah mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti kepengurusan dokumen kependudukan yang berdampak pada pendataan warga miskin untuk pemberian bantuan pemerintah suatu hari nanti. Akses dalam artian menyambungkan kehidupan masyarakat yang terletak di hutan dan perkebunan dengan pusat mobilisasi melalui pembangunan infrastruktur jalan.

Kepentingan kelompok sasaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat diperhatikan. Keseluruhan program pembangunan seutuhnya ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menjadi isu mayor

di wilayah ini namun target pembangunan yang diinginkan tidak kunjung tercapai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber dengan melakukan analisis kemiskinan pada aspek ekonomi dan sosial baik dari segi fisik dan non fisik, terlihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada kategori tinggi. Pada kategori ekonomi-fisik, persentase yang dihasilkan adalah 70%, artinya kemiskinan secara ekonomi fisik meliputi kepemilikan lahan, lahan Garapan, kualitas rumah, perabot rumah tangga dan sarana transportasi masih tinggi.

Kemudian, untuk kategori ekonomi non-fisik berada pada kategori rendah, meskipun nilainya di bawah ekonomi-fisik yakni 65%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa factor kemiskinan dari segi ekonomi non fisik yang didalamnya meliputi pendapatan keluarga, pengeluaran untuk perumahan, pengeluaran untuk kesehatan, pengeluaran untuk pendidikan dan pengeluaran untuk pangan masih tinggi. Selanjutnya, pada indikator sosial-fisik, merupakan indikator dengan persentase tertinggi yakni 72%. Adapun parameter didalamnya meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sampah, fasilitas air bersih, dan fasilitas sanitasi.

**Tabel 2. Hasil Analisis Indikator Kemiskinan**

Indikator	Tinggi	Sedang	Rendah	Σ%
Ekonomi (Fisik)	45	73	32	70%
Ekonomi (Non-Fisik)	37	67	46	65%
Sosial (Fisik)	42	89	19	72%
Sosial (Non-Fisik)	41	74	35	68%

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Meskipun kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih cukup tinggi, namun Kabupaten ini memiliki *progress* yang terus naik dalam hal pembangunan jalan penghubung. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan poin-poin yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Meskipun dalam menjalankannya sering terkendala anggaran yang tipis, dapat dilihat pada tahun 2020-2022 dimana Covid-19 menjadi isu yang mendominasi penghabisan anggaran negara dan daerah, namun pembangunan infrastruktur tetap terlaksana dan tetap memberikan progress perlahan.

b. Tipe Manfaat

Teori ini jelas memberikan batasan yang rigid tentang manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran harus terwujud secara *tangible*. Suatu kebijakan yang memuat pelaksanaan program-program akan dianggap sukses apabila timbul manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran, berbeda dari keadaan sebelum program tersebut diimplementasikan. Apabila kelompok sasaran tidak merasakan adanya perubahan yang positif dapat dikatakan program tersebut gagal. Kegagalan sebuah program bisa terjadi sebab satu atau hal lainnya. Kondisi eksternal dan internal program juga ikut menyumbang presentase keberhasilan program tersebut.

Dari keseluruhan pembahasan pada sub bagian ini dapat diketahui bahwa dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mempertimbangkan tipe-tipe manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakatnya. Tipe-tipe manfaat itu digolongkan menjadi sosio-ekonomi dan kultural. Pada sektor sosio-ekonomi tentu pembangunan infrastruktur akan membuat perekonomian masyarakat meningkat. Perekonomian yang meningkat ini bukan hanya pada satu daerah paling urban di sana, melainkan keinginan teguh untuk menerapkan pemerataan kemerdekaan ekonomi bagi masyarakat. Manfaat kultural yang dirasakan

adalah munculnya kebiasaan positif baru bagi masyarakat seperti kesadaran memelihara air bersih dan sanitasi.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya. Besaran perubahan yang ingin dicapai ini tentunya sudah tertulis dan dibedah sesuai dengan pengukuran kemampuan Pemerintah Daerah. Pengukuran kemampuan ini dilihat dari segi kemampuan finansial daerah, kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sumber daya alam, dan estimasi waktu pengerjaan. Derajat perubahan ini berfungsi menjadi target yang pada akhirnya akan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut.

**Tabel 3. Capaian Pembangunan Jalan Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Kondisi Jalan Mantap (Baik dan Sedang)	Kondisi Jalan Tidak Mantap (Rusak Ringan dan Rusak Berat)	Total
1.	2019	58,36% (542,366 Km)	41,64% (387,05 Km)	100,00% (929,412 Km)
2.	2020	60,61% (563,353 Km)	39,38% (366,059 Km)	100,00% (929,412 Km)
3.	2021	65,985% (613,268 Km)	34,015% (316,144 Km)	100,00% (929,412 Km)
4.	2022	66,51% (618,132 Km)	33,49% (311,280 Km)	100,00% (929,412 Km)

Sumber: PUPR Kep.Meranti

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pengelompokan pembangunan jalan yakni kelompok Kondisi Jalan Mantap dan Kondisi Jalan Tidak Mantap. Kondisi Jalan Mantap meliputi dua indikasi yakni jalan yang tergolong baik dan jalan yang tergolong sedang. Sedangkan, Kondisi Jalan Tidak Mantap meliputi jalan rusak ringan dan jalan rusak berat. Tahun 2019 – 2022 kelompok Kondisi Jalan Mantap selalu meningkat meskipun tidak stabil. Dan Peningkatan jalan paling sedikit terjadi pada rentang tahun 2021 ke 2022 karena keterbatasan anggaran sebab adanya Covid-19. Berarti bahwa kondisi jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti secara gradual diperbaiki.

Dalam penelitian ini, target pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti terwujud dalam Rencana Strategis Bina Marga yang memuat beberapa poin pembangunan. Poin pembangunan yang termasuk dalam rencana ini adalah Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jembatan, Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan Strategis Desa, dan Rekonstruksi Jalan Strategis Desa. Dalam target ini juga tertera presentase pembangunan yang hendak diwujudkan. Selain dalam bentuk presentase, derajat pengukuran kesuksesan pembangunan ini juga ditulis dalam bentuk angka, misalkan berapa banyak jembatan yang akan diperbaiki.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam penelitian ini aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan adalah Lembaga eksekutif dan legislatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian untuk surat keputusan dikeluarkan oleh DPRD wilayah tersebut. Untuk pelaksanaan program pembangunan dilaksanakan oleh Dinas PUPR bersama dengan jasa konstruksi.

Dalam wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berkehendak dalam pembuatan keputusan adalah DPRD yang nantinya bersama dengan Bupati membuat program pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada status quo. Pembuatan kebijakan ini juga harus didukung dengan analisis yang tepat dan akurat terutama dalam hal alokasi anggaran. Selanjutnya, untuk melaksanakan tiap-tiap kepentingan tersebut yang terbagi atas bidang-bidang pembangunan maka dibutuhkan perangkat daerah. OPD di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki fungsi praktikal sebagaimana OPD di daerah lainnya juga. Supaya bisa mencapai target pembangunan, OPD akan bekerja sama dengan aktor ketiga seperti kontraktor, kuli bangunan, dan bahkan masyarakat local.

Dari keseluruhan pembahasan pada sub bagian ini dapat diketahui bahwa dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengambilan keputusan sesuai porsinya masing-masing. Penjelasan lebih detailnya adalah karena pembangunan infrastruktur ini melibatkan beberapa instansi dan aktor, maka membuat peran dan partisipasi mereka berbeda-beda. Pengambilan keputusan pada setiap instansi sudah disesuaikan dengan area kekuasaan dan kewenangannya. Pengambilan keputusan ini juga dimonitor dengan adanya check and balance antar instansi sehingga kongruensi dan integritas pembangunan tetap terjaga.

e. Pelaksanaan Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti ini, pelaksanaan program sudah dapat dikatakan terlaksana sebagaimana mestinya sebagaimana manfaat dalam hal ekonomi yang juga dirasakan oleh warga masyarakat setempat. Pada testimoni yang sudah dianalisis oleh peneliti pada laman media sosial dari Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, warga lokal sasaran pembangunan jalan merasa terbantu aktivitasnya dengan jalan baru penghubung tersebut.

Dalam pembangunan jembatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, proyek besar yang hendak dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah untuk menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Pulau Meranti sebagai salah satu wujud peningkatan perekonomian daerah tersebut. Untuk menjalankan rencana tersebut, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Reni Ahiantini melakukan kunjungan ke Riau dan bertemu Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Pemerintah akan melakukan pembangunan jembatan dari Ketam Putih, Bengkalis menghubungkan Dakal di Kepulauan Meranti.

Pemerintah Daerah berusaha semaksimal mungkin dalam pemerataan pembangunan. Terwujud dalam upaya-upaya pembangunan akses-akses yang memudahkan mobilitas warga dalam aspek sosial-ekonomi. Namun, beberapa kali terdapat kasus pembangunan yang dibatalkan contohnya seperti rencana untuk membangun Kantor Bupati baru di Desa Sesap, Kecamatan Tebingtinggi, karena menelan biaya tinggi, yakni sebesar Rp40 miliar. Rencana ini dibatalkan karena tidak memiliki urgensi lebih kuat dibandingkan dengan pembangunan jalan penghubung antar desa. Oleh sebab itu, karena keterbatasan alokasi anggaran untuk saat ini pembangunan difokuskan kepada sektor-sektor vital yang berimbas pada pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.



f. Sumberdaya yang dilibatkan

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya- sumber daya yang supportif agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya ini bisa beragam. Seperti dalam bentuk Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. Sayangnya dalam rangka pembangunan SDA yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah terbatas. Terbatas dalam artian masih mengandalkan pembelian material dari kabupaten lain dengan akses yang sulit. Inilah yang menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Besarnya ongkos kirim material juga menjadi momok dalam pemaksimalan anggaran yang diberikan. Material yang mahal disertai dengan SDM pekerja bangunan yang terbatas dan tidak professional juga membuat pembangunan ini sedikit terhambat. Kabupaten Kepulauan Meranti memang memiliki anggaran yang terbatas. Maka Pemerintah Daerah melakukan pembangunan juga secara lambat. Dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur Pemerintah Darah Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan cukup baik. Penilaian ini peneliti lihat dari bagaimana progres pembangunan tetap ada meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran dan kendala geografis medan pembangunan. Progres ini juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar yang merasa terbantu dalam melaksanakan mobilitas sehari-hari. Demikian pembangunan juga tidak hanya berat pada pembangunan jalan melainkan juga rumah layak huni dan edukasi sanitasi yang baik bagi masyarakat.

2. Lingkungan Implementasi

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki. Disebabkan oleh aktor yang terlibat beranekaragam ini maka bentrokan kepentingan sering terjadi. Pada sisi instansi eksekutif atau pelaksana, bentrokan kepentingan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlalu besar. Contoh kecilnya adalah dalam hal penentuan alokasi anggaran pembangunan dimana Bina Marga yang bertugas mengajukan RAB dengan mempertimbangan rencana strategis mereka harus bertabrakan dengan kepentingan Bappeda dalam pembagian anggaran di sektor-sektor vital lainnya selain pembangunan.

Selain dari sisi pemerintah, bentrokan kepentingan juga terjadi di kalangan masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Diketahui Bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas beberapa pulau terpisah. Jarak antar desa juga jauh dengan akses yang sulit pula. Ketika diadakan agenda pembangunan untuk daerah-daerah yang terdekat dengan pusat kota membuat daerah lain yang lebih terpencil merasa iri. Fenomena ini dinamakan *social jealousy*. *Social jealousy* berakibat buruk karena melemahkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahnya. Bisa jadi berakibat fatal dengan penolakan pembangunan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal pembangunan yang belum merata ini bisa jadi disebabkan karena daerah tersebut belum masuk skala prioritas di tahun anggaran tersebut.

Dari keseluruhan pembahasan pada sub bagian ini dapat diketahui bahwa dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur Pemerintah Darah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan, lumrah apabila beberapa kelompok masyarakat tidak menyetujui program tersebut. Kelompok

masyarakat ini membuat aliansi dalam rangka mengkritisi program pemerintah. Pemerintah sebenarnya dapat melihat dari sisi positif dimana kritik semacam ini dapat dijadikan input pembangunan di rencana kerja selanjutnya. Sebagaimana dipaparkan oleh salah satu narasumber dimana daerah-daerah terpencil itu tidak aktif dalam mengadvokasikan kebutuhan pembangunan mereka, sehingga pemerintah juga tidak memiliki cukup data kebutuhan masyarakat yang harus dibangun. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih memperhatikan kelompok yang melemparkan kritik terhadap program pembangunan mereka.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara. Peneliti memahami bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti memegang karakteristik terkait pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan menghubungkan pulau-pulau dan desa-desa. Pemerintah Daerah mengutamakan tujuan pembangunan yakni untuk:

- 1) Pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- 2) Perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3) Peningkatan ketersediaan infrastuktur dasar bagi penduduk miskin;
- 4) Peningkatan kerjasama pengelola hutan antara warga miskin sekitar hutan dengan perusahaan;
- 5) Pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik; dan

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan pola kelompok masyarakat (pokmas). Karakteristik pada masing-masing aktor dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur guna mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bertugas membuat kebijakan dan landasan hukum yang jelas, Bupati beserta OPD memiliki tanggung jawab pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sedangkan, masyarakat seharusnya memberikan support dan menikmati hasil pembangunan. Masyarakat juga seharusnya memberikan evaluasi jika ada pembangunan yang dirasa kurang.

c. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana disorot di bagian ini. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana. Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan. dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur Pemerintah Darah Kabupaten Kepulauan Meranti, peneliti tidak menemukan kasus penyelewengan anggaran. Melainkan peneliti menemukan adanya ketidakpatuhan warga dalam merespon adanya pembangunan. Sebagai contoh protes kecemburuan sosial dalam pembangunan ini dimana menyulitkan pemerintah dalam menenangkan warga. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebenarnya sudah berusaha untuk menjanjikan pembangunan. Namun dikarenakan banyaknya keterbatasan dan juga skala prioritas tersebut membuat pemenuhan janji tersebut beberapa kali terlewatkan. Oleh sebab itu, muncullah dilema dalam tubuh pemerintah daerah tersebut.

## **Dampak Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang penting untuk mendorong pertumbuhan dalam hal ekonomi baik pada Tingkat nasional ataupun daerah. Di sisi lain, infrastruktur juga memiliki kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rohim, 2024). Terdapat beberapa dampak positif Pembangunan infrastruktur pada sosial dan ekonomi. Adapun bentuk-bentuk tersebut dapat dilihat pada hal berikut.

1. Peningkatan konektivitas seperti infrastruktur. Infrastruktur akan berdampak pada kemudahan aksesibilitas antarwilayah. Hal tersebut kemudian dapat memudahkan mobilitas orang dan barang, mendukung pertumbuhan bisnis serta dapat memperluas pasar.
2. Penciptaan Lapangan Kerja. Adanya proyek infrastruktur yang besar tentunya membutuhkan tenaga kerja yang signifikan. Sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Adanya peningkatan akses. Pembangunan infrastruktur memberikan misalnya jaringan telekomunikasi, listrik serta air bersih untuk dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap produktivitas dan kualitas hidup.
4. Adanya peningkatan daya beli. Melalui Pembangunan infrastruktur yang memadai maka masyarakat akan mudah mengakses barang dan jasa. Sehingga akan berdampak dan berkontribusi pada peningkatan daya beli serta pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauh dari pemerataan dan keselarasan. Pembangunan infrastruktur demi mengentaskan kemiskinan memang tidak mudah. Banyaknya aspek pembangunan yang berlomba-lomba untuk diprioritaskan menjadi salah satu alasan mengapa sangat sulit bagi pemerintah daerah dengan segala keterbatasan yang dimiliki untuk bisa memaksimalkan program mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi Kabupaten Kepulauan Meranti harus menunggu tahap demi tahap pembangunan agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat lokal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan pada faktor ekonomi dan sosial tergolong masih tinggi. Namun, upaya untuk mendorong Pembangunan agar menyelesaikan masalah kemiskinan sudah ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil data-data penelitian dan hasil penelusuran studi pustaka yang didapatkan selama melakukan penelitian tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat penting karena wilayah ini merupakan pemekaran baru dan terletak sangat jauh dari pusat pembangunan sehingga proses pembangunan di wilayah ini banyak ditemukan keterbatasan dan kendala. Adapun upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Meranti dalam menangani masalah kemiskinan dan pembangunan manusia adalah dengan meningkatkan infrastruktur dasar dengan program pembangunan jalan, jembatan, rumah layak huni, sekolah, pusat kesehatan masyarakat. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki progress yang terus naik dalam hal pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan, meskipun anggaran yang sangat minim menyebabkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyiapkan strategi-strategi lain yang mungkin tidak tercantum dalam RPJMD.
2. Dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai cukup baik dalam melaksanakan pembangunan, dilihat dari banyaknya tantangan dari mulai anggaran yang kecil, medan pembangunan letak geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi kendala namun pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih bisa melanjutkan pembangunan infrastuktur di daerahnya. Adapun dampak pembangunan ini berdampak positif dan membantu masyarakat, jalan penghubung yang dibangun oleh pemerintah dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, dan hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat terpencil.

## REFERENSI

- Azhari, F. M., & Mashur, D. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Tkp) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals(Sdgs) Di Pekanbaru. *Cross-Border*, 5, 574–589. <http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1108/883>.
- Gevisioner, Bangun R, & Karyanti. (2013). *Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau*. Jurnal Bina Praja| Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2013: 53 - 62. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/87/>
- Handalani, R.T. (2019). Determinant of Poverty in Indonesian's Province: A Review of Public Policy. Jurnal Borneo Administrator. *Jurnal Borneo Administrator, Volume 15 Nomor 1*, 59–80.
- Amida, V. A., & Sitorus, J. R. H. (2020). Penerapan Regresi Logistik Biner Multilevel dalam Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Rumah Tangga, dan Wilayah Terhadap Status Kemiskinan Balita di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 967–977.
- Parwodiwiyono, S. (2021). Analisis Determinan Kemiskinan di Pulau Jawa dengan Model Regresi Spasial. *Seminar Nasional Geomatika 2020: Informasi Geospasial Untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan*.